ABSTRAK

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS NOTARIS DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS)

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum wajib untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Peraturan ini sudah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: "Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu".

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kewajiban dan tanggung jawab Notaris serta penerapan pengaturan hukum dari Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 juncto Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris dalam melaksanakan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Kudus dan apa permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan melihat realita yang terjadi dalam praktek di lapangan serta mencari keterangan dari pihak bersangkutan melalui wawancara kemudian dihubungkan dengan aspek hukum yang berlaku.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: ditemukan fakta bahwa tidak semua akta Notaris diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu secara sepenuhnya karena ada sebagian jenis jasa yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk membayar pajak yang dirasa berat apabila harus ditanggung oleh Notaris tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Kudus adalah kurangnnya penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat sehingga masyarakat sendiri tidak mengetahui bahwa terdapat aturan mengenai adanya pemberian jasa hukum di bidang Kenotariatan.

Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah seharusnya memberikan dukungan mengenai pemberlakuan aturan tentang kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma dengan cara melakukan sosialisasi tentang adanya aturan pemberian jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma yang ditunjukkan kepada masyarakat tidak mampu. Lalu diperlukan peraturan yang lebih jelas mengenai kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan layanan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, pengaturan tersebut dapat berisikan tentang kejelasan dari jenis-jenis pelayanan apa saja yang dapat dibebaskan atas pembayaran honorarium Notaris.

Kata kunci: Notaris, Jasa Hukum, Secara Cuma-Cuma

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF LIABILITY AND NOTARY RESPONSIBILITIES IN PROVIDING DISTRICT LAW SERVICES THAT WILL BE FREE TO PEOPLE NOT ABLE TO ACCEPT THE LAW NUMBER 30 OF 2004 JUNCTO LAW NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING THE POSITION OF NOTARY(CASE STUDY OF NOTARY IN KUDUS REGENCY AREA)

Notary in carrying out his position as a public official is obliged to provide legal services free of charge to people who can not afford. This regulation has been regulated in Article 37 of Law Number 30 Year 2004 of Juncto Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary that reads: "Notary is obliged to provide legal services in the notary public for free to people who cannot afford".

The problem examined in this study is how the form of obligations and responsibilities of the Notary and the application of legal arrangements of Article 37 paragraph 1 of Law number 30 of 2004 in conjunction with Law number 2 of 2014 concerning the position of notary in carrying out legal services for free to the poor people in Kudus Regency and what problems are faced by Notaries in providing legal services in the notary area free of charge to poor people in Kudus Regency.

The method of approach used in this research is empirical juridical legal research, that is by looking at the reality that occurs in practice in the field and seeking information from the parties concerned through interviews and then related to aspects of applicable law.

The results of this research are: found that not all notarial deeds are given free of charge to the people who are not fully capable because there are some types of services that require a large enough cost to pay taxes that are considered heavy if they must be borne by the Notary. The problem faced by Notaries in providing legal services in the notary area free of charge to disadvantaged communities in Kudus Regency is the lack of counseling conducted to the community so that the community itself does not know that there are rules regarding the provision of legal services in the notary sector.

Suggestions from this research are the Government should provide support regarding the application of the rules regarding the obligations and responsibilities of the Notary public in providing legal services free of charge by means of socializing about the existence of rules for providing legal services in the notary public for free which are shown to the poor. . Then clearer regulations are needed regarding the obligations and responsibilities of Notaries in carrying out services free of charge to disadvantaged people, these arrangements can contain clarity of the types of services that can be waived on payment of Notary honorarium.

Keywords: Notary, Legal Services, Free of Charge